

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DALAM PERBANKAN SYARIAH

Juwita Dewi Br Pohan¹, Eza Okhy Awalia Br Nasution², Puspa Indah Sari Pohan³
Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara
E-mail: jdewipohan@gmail.com

Abstract

Compared to other industries, the Indonesian banking sector is currently part of the economy which is growing more dynamically and significantly. In recent years, the Islamic banking sector has grown significantly, mainly due to the explosive growth of Indonesia's financial services sector. Good governance is a business practice that clarifies the relationships between various stakeholder organizations and identifies the relationship between strategy and operations. In general, the principles of good governance are very important and are followed by all business actors, especially the financial sector. Banking is used as a financial intermediary between organizations that need money and those who have money to lend. The goal of a good corporate citizen is to continually drive the company's growth, employee productivity, and the desire of the company's long-term goals in a given area. The purpose of this research is to understand how good corporate governance affects the business activities of Islamic banks. The main objective of GCG work is to help companies reach their full potential through initiatives based on transparency, responsibility, accountability, independence and good judgment. This research was conducted using a qualitative descriptive methodology as a source of literature. The type of data comes from various journals related to GCG and banking. The results of this study indicate that good corporate governance (GCG) is very important to ensure that banks can manage financial stability and performance in a safe and effective manner and ensure that prospects for operations can operate normally. and can effectively comply with fair banking regulations.

Key words: *Good Corporate Governance, Performance, Islamic Banking*

Abstrak

Dibandingkan dengan industri lain, sektor perbankan Indonesia saat ini merupakan bagian dari perekonomian yang tumbuh lebih dinamis dan signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor perbankan syariah tumbuh secara signifikan, terutama karena ledakan pertumbuhan sektor jasa keuangan Indonesia. GCG adalah praktik bisnis yang memperjelas ikatan antara berbagai pemangku kepentingan organisasi dan mengidentifikasi hubungan antara strategi dan operasi. Secara menyeluruh, prinsip tata kelola yang baik sangat penting dan diikuti oleh seluruh pelaku dunia usaha, khususnya sektor keuangan. Perbankan digunakan sebagai perantara keuangan antara organisasi yang membutuhkan uang dan mereka yang memiliki uang untuk dipinjamkan. Tujuan warga korporat yang baik adalah untuk terus mendorong pertumbuhan perusahaan, produktivitas karyawan, dan pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan di bidang tertentu. Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana tata kerja perusahaan yang baik mempengaruhi kegiatan usaha bank syariah. Tujuan utama dari pekerjaan GCG adalah membantu perusahaan mencapai potensi penuh mereka melalui inisiatif berdasarkan transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, independensi dan penilaian yang baik. Penelitian ini dikerjakan dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif sebagai sumber literatur. Jenis data berasal dari berbagai

jurnal terkait GCG dan perbankan. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa tata kerja perusahaan yang baik (GCG) sangat penting untuk memastikan bank dapat mengelola stabilitas dan kinerja keuangan secara aman dan efektif serta memastikan prospek usahanya dapat beroperasi secara normal. dan dapat secara efektif mematuhi peraturan perbankan yang adil.

Kata kunci: Good Corporate Governance, Kinerja, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Belum lama ini, dua skandal kebangkrutan perusahaan, Enron dan WorldCom, mengguncang komunitas bisnis di Amerika Serikat. Hal ini mengingatkan kita bahwa praktik bisnis yang tidak etis (unethical business practice) terjadi di negara-negara yang menganut prinsip GCG yang sangat baik. Skandal tersebut dipicu oleh pengabaian aspek moral yang terkandung dalam prinsip GCG yang baik, khususnya prinsip transparansi dan publisitas serta prinsip Bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena penerapan tata kelola perusahaan yang baik hanya berdasarkan kepercayaan kepada masyarakat sebagai pelaku bisnis dan mengabaikan aspek moral ajaran agama. Sebaik apa pun suatu sistem bekerja di suatu perusahaan, ketika karyawan atau manajemen berperilaku tidak normal dan tidak memiliki etika bisnis, penipuan bisa terjadi, yang akan merugikan perusahaan bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan. Terlepas dari sistem bisnis yang berlaku, ketika karyawan atau manajemen bertindak tidak tepat dan melanggar etika bisnis, praktik penipuan dapat muncul yang sangat merugikan perusahaan dan berdampak negatif pada laba.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang cukup lambat tercermin dari kekuatan dan semangat ekonomi seperti Indonesia. Perusahaan perbankan yang kuat harus menghadapi krisis keuangan ini. Laju pertumbuhan yang sangat lambat dan kompleksitas bank dapat berdampak negatif terhadap kinerja bank. Risiko yang diambil bank Indonesia dapat ditingkatkan dengan perbankan yang ekstensif. Industri perbankan merupakan salah satu sektor yang aktif mendorong kepercayaan masyarakat, sehingga standar keamanan bank harus dihormati. Menurut sebuah studi oleh Bank Dunia, pengenalan sistem pengendalian internal, juga dikenal sebagai tata kelola perusahaan, merupakan satu-satunya penyebab krisis yang paling penting di Asia Tenggara. Manajemen yang buruk memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan dari meningkatnya berbagai skandal keuangan. Ada beberapa kasus perampokan bank, penggelapan, pembobolan dan korupsi di sistem perbankan Indonesia. Penerapan tata kelola perusahaan yang kuat dalam industri perbankan diharapkan dapat berdampak pada perbankan karena dapat meningkatkan arus kas dan mengurangi risiko yang terkait dengan

tindakan manajemen yang terkadang merugikan bank itu sendiri. Bisnis yang menerapkan manajemen yang baik akan lebih efisien dan mengalami peningkatan dalam operasionalnya sehari-hari.

Fundamental Setelah krisis keuangan tahun 1998, pentingnya tata kelola perusahaan yang efektif di Indonesia menjadi semakin jelas. Krisis mata uang tersebut juga mempengaruhi kepercayaan dan krisis mata uang dalam kehidupan bisnis. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas memungkinkan perusahaan untuk memanipulasi data. Pelanggaran yang berkesinambungan dengan prinsip-prinsip GCG yang baik di luar negeri di Indonesia merupakan hak dan kewajiban para pihak terkait dengan hasil perusahaan, sehingga penguasaan atas hasil perusahaan dilonggarkan.

Selain berperan sebagai lembaga perantara keuangan, perbankan tetap kuat dalam menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil (agen pembangunan). Sementara itu, bank berharap bisa membantu desentralisasi informasi untuk menciptakan agen yang seimbang dan perekonomian yang sehat dan stabil (stability). (UU No. 10 Tahun 1998). Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mempertahankan kepercayaan masyarakat, bank harus dikelola dengan baik dan mengupayakan profitabilitas sendiri untuk meningkatkan permodalan. Kinerja mengukur komitmen untuk melakukan tugas saat ini, dengan mempertimbangkan misi, tujuan, sasaran, dan nilai inti perusahaan. Dengan memahami alur kerja saat ini, bank dapat menentukan tingkat keberhasilan tugas yang terlibat, memungkinkan bank untuk merumuskan strategi untuk periode mendatang.

Peneliti didorong untuk menyelidiki dengan hati-hati karena dalam industri perbankan, semua tugas operasional, termasuk pengiriman uang dan perubahan rencana bisnis, harus dikerjakan sesuai dengan hukum Syariah. Menurut syariat Islam yang diatur di sini, bank harus berpedoman pada nilai-nilai syariat Islam. Nilai-nilai syariat tersebut sudah mencakup prinsip-prinsip tata kerja yang tertinggi. Oleh karena itu, diharapkan prinsip-prinsip nilai-nilai Islam dapat digunakan untuk memandu pembentukan profesional lembaga komersial dan keuangan yang sesuai dengan Syariah dan memandu interaksi ekonomi, komersial, dan sosial untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan peraturan Syariah. Prinsip. Buat aturan permainan dan praktik terbaik.

Dengan kata lain, bank syariah menjadi lebih efisien dalam melakukan tata kelola perusahaan. Metode manajemen yang efektif mengarah pada pengembangan praktik manajemen yang baik yang dapat meningkatkan produktivitas organisasi, mengurangi risiko yang diambil oleh direksi untuk kepentingan pribadi, dan secara umum meningkatkan

kepercayaan investor untuk menerima kondisi bisnis yang merugikan bagi perusahaan.
Kelangsungan hidup

Dengan latar belakang di atas, sebuah pertanyaan mungkin muncul di bagian pembahasan esai ini: "Apakah tata kelola perusahaan yang kuat berdampak pada kinerja bisnis di perbankan syariah?"

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Good Corporate Governance

Menurut Bank Dunia, definisi Good Corporate Governance mencakup undang-undang bisnis, standar atau organisasi yang mendukung hak dan kewajiban pemilik bisnis, manajer dan direktur kepada publik dan investor mereka (pemegang saham dan kreditur). (Indriyani and Asyuti 2019)

Tata kelola perusahaan yang baik didefinisikan sebagai teknik dan struktur organisasi spesifik yang ditetapkan entitas bisnis (seperti pemegang saham/pemegang saham, anggota komite/dewan dan direktur perusahaan) untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan akuntabilitas organisasi untuk melindungi hak pemangku kepentingan lainnya. seperti karyawan atau karyawan dan personel pelanggan) dan mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan harga referensi yang berlaku. (Memet Juliansyah 2018)

Tata kelola perusahaan yang baik, atau biasa disebut sebagai Good Corporate Governance (GCG), adalah prinsip yang mendorong dan membantu perusahaan menemukan keseimbangan antara kelayakan keuangan dan keinginan pemangku kepentingan dan pemegang saham umum untuk melakukan hal yang benar. Terminologi GCG sendiri mengandung empat prinsip penting yang harus digunakan oleh sebuah perusahaan agar dapat memperoleh kepercayaan publik dan menumbuhkan penerimaannya secara luas di masyarakat. Empat pilar prinsip ini adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan. Pilar kelima adalah kemandirian (independence).

Dalam praktiknya, GCG telah lama dikenal di industri perbankan. Hal ini tercermin dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Governance Bank Umum. Menurut analisis PBI, tata kelola yang baik harus diterapkan untuk meningkatkan produktivitas bank serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan meningkatkan kesadaran akan peraturan perundang-undangan terkait yang mempengaruhi seluruh industri perbankan. Keberadaannya juga disebut-sebut sebagai satu-satunya strategi paling efektif untuk menyelaraskan kerja internal sistem perbankan nasional dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Tata kelola perusahaan juga dapat didefinisikan

sebagai kemitraan resmi antara dewan direksi perusahaan, tim manajemennya, dan pemangku kepentingan serta pemegang sahamnya.(Nasution 2019)

Tata kelola perusahaan juga mencakup persyaratan dan prosedur yang harus diikuti oleh posisi direktur ketika menyajikan informasi terkait strategi operasi perusahaan. Ini juga berlaku untuk bank. Tata kelola perusahaan di bank juga melibatkan penyediaan struktur organisasi yang fleksibel untuk mendukung bank dalam berbagai proses manajemen, termasuk:

- a. sebuah. Ringkasan tujuan, misi dan visi yang diinginkan oleh manajemen senior bank.
- b. Inisiasi dan implementasi inisiatif operasional bank sehari-hari.
- c. Menekankan dan memperhatikan kebutuhan stakeholders bank.
- d. Yakinkan diri Anda bahwa bank beroperasi dengan aman dan legal.
- e. Berusaha untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang terjaln dengan operasional Bank
- f. Bersedia melindungi hak-hak deposan dan karyawan rekening bank universal.

Sehubungan dengan perbankan syariah atau tata kelola perusahaan, hal-hal berikut harus dipertimbangkan:

- a. Sekelompok organisasi berbahasa Persia dengan tim manajemen terkait bank syariah.
- b. Menyediakan dana yang cukup untuk badan administratif seperti Kantor Direktur, Kantor Syariah dan Departemen Manajemen untuk mencapai tujuan rekonsiliasi pemangku kepentingan dan menyediakan infrastruktur pemantauan yang efektif untuk mendorong bank syariah menggunakan dana mereka secara lebih efektif.
- c. Menghormati aturan dan prinsip Syariah

GCG adalah suatu sistem manajemen perusahaan yang profesional berdasarkan prinsip keterbukaan, tanggung jawab, fokus, fleksibilitas dan kemampuan bekerja dalam tim.

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

GCG yang baik adalah nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh semua institusi, termasuk bank syariah. Hal ini semakin terbantu dengan adanya “akuntansi publik” yang dikaitkan dengan standar operasional perbankan yang diharapkan menjadi undang-undang yang baik, seperti UU No. Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan pada permulaan dan tata cara pelaksanaannya. Selain itu, juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perbankan syariah yang dituangkan dalam Al-Quran, Hadits, Ijma dan otoritas agama.

Tata kelola yang baik diperlukan agar pasar menjadi efisien, terbuka, dan patuh. Implementasi tata kelola yang baik harus didukung pada tahun-tahun yang harus terkait, yaitu, negara dan mekanismenya sebagai regulator, ekonomi sebagai agen pasar dan masyarakat sebagai konsumen produk dan jasa perusahaan.(Maulidiyah 2013)

TARIF singkatan dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran dan merupakan dasar tata kelola perusahaan yang baik. Berikut adalah ringkasan dari masing-masing sistem tata kelola perusahaan yang kuat tersebut di atas.

1. Keterbukaan Informasi (Transparency)

Transparansi adalah bagian penting dari strategi bisnis, baik digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi penting atau yang lainnya.(Supianti 2022) Transparansi memastikan informasi yang akurat, tepat waktu, jelas, dan sebanding tentang bisnis, manajemen, dan hubungan pribadi, termasuk informasi berikut:

- 1) Informasi tentang hasil keuangan dan operasional perusahaan, tujuan, keanggotaan komite dan kemungkinan risiko di masa depan tidak boleh diungkapkan.

Keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional dan kepemilikan perusahaan, yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak ada batasan pengungkapan informasi dalam dokumen tentang hasil keuangan dan operasional perusahaan, tujuan perusahaan, direktur dan kemungkinan faktor risiko.
- b. Laporan harus dikumpulkan, ditinjau, dan dilindungi sesuai dengan kualitas yang ketat di bidang penjaminan, penguraian informasi keuangan dan non-keuangan, serta audit.
- c. Auditor independen harus melakukan audit tahunan untuk memberikan saran kunci eksternal yang objektif tentang penerapan dan pengajuan kredit bisnis.
- d. Untuk memastikan relevansi data yang diperoleh, perhatian harus diberikan pada akurasi, ketepatan waktu, dan efektivitas biaya saat mengumpulkan data..(Maulidiyah 2013)

2. Akuntabilitas (Accountability)

Agar perusahaan dapat beroperasi secara ekonomis secara efisien, akuntabilitas merupakan faktor kunci dalam manajemen organisasi yang efektif.

3. Responsibility (Pertanggung jawaban)

Prinsip-prinsip di atas mensyaratkan praktik bisnis agar setara dengan prinsip Syariah yang baik dan semua hukum dan peraturan yang ditetapkan.

4. Independency (Kemandirian)

Kemandirian adalah elemen kunci dari pemerintahan yang baik; Secara khusus, ini menentukan pada kondisi di mana bisnis diproses oleh para profesional tanpa campur tangan atau batasan dari luar yang bertentangan dengan nilai-nilai atau undang-undang industri mereka.

5. Fairness (Kewajaran)

Prinsip keadilan adalah bagaimana perusahaan bertindak terhadap organisasi yang mengikuti standar dan pedoman yang disyaratkan. Namun asas keadilan ini juga dapat disebut sebagai keadilan dan keadilan untuk mengecualikan para pihak dari kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam perspektif islam antara lain:

a. Shiddiq

Anda harus memastikan bahwa semua pemrosesan dilakukan dengan cara etis yang memenuhi standar kesopanan tertinggi. Nilai teks ini menekankan bahwa penyaluran dana masyarakat dicapai dengan menjaga akhlak yang baik (halal) dan menghindari perbuatan maksiat (underhat) selain perbuatan-perbuatan lain yang jelas-jelas melanggar hukum (haram).

Dasar Hukum Siddiq Allah SWT Q.S. At-Taubah ayat 119 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.(Q.S. At-Taubah: 119).

Siddiq menjelaskan bahwa semua yang seharusnya terjadi sebenarnya terjadi. Orang dengan sifat ini percaya bahwa Allah selalu hadir untuk mencegah bahaya, membuat mereka tidak dapat melakukan kejahatan.

b. Tabligh

Berbagi informasi dengan hormat dan mengedukasi publik tentang nilai, produk, dan layanan. Mendidik masyarakat tentang manfaat menggunakan layanan tertentu juga penting untuk kesuksesan. Tabligh berarti mengungkapkan. Ini ada hubungannya dengan melakukan kebenaran; Jika generasi sebelumnya melakukannya, maka semua umat Islam saat ini harus mengamalkan kebenaran. Karena kedua perbuatan tersebut, Allah SWT memerintahkan untuk membela kebaikan, mencegah kejahatan dan berperilaku bijaksana. Ini ada di Q.S. Ayat 110 Ali-Imran dimana Allah SWT menegaskan bahwa:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”. (Q.S. Ali-Imran: 110)

Dengan sikap tabligh, seseorang berharap menjadi pemimpin yang hebat, mampu memisahkan yang benar dari yang salah dan mendorong orang lain ke busur kebenaran.

c. Amanah

Dengan mengikuti prinsip kehati-hatian dan kejujuran Shahibil Mall dalam berurusan dengan uang, hubungan antara pemilik uang dan orang yang menangani uang dapat lebih dipahami. Hukum Dasar Iman sebagaimana Allah SWT Q.S. Ayat 8 Al-Mu'minu berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya”. (Q.S. Al-Mu'minun: 8)

Amanah bermakna dapat dipercaya, tidak menghakimi dan tidak tergoyahkan. Segala sesuatu yang dilakukan dilakukan dengan hati-hati. Dokumen ini telah mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal perusahaan. Kepercayaan pihak lain dalam bisnis memiliki konsekuensi seperti kelayakan kredit, citra dan reputasi.

d. Fathanah

Pastikan persaingannya profesional dan ketat sehingga Anda bisa mendapatkan keuntungan maksimal dalam batas risiko yang ditetapkan oleh organisasi Anda. Antara lain, ini melibatkan layanan singkat dengan kurangnya kepastian dan persetujuan serta kurangnya emosi.

Kebijakan ini memecahkan masalah perusahaan, sehingga meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Pada zaman para Rasul, kecerdasan dibutuhkan untuk mengkomunikasikan kehendak Tuhan kepada alam semesta. Namun, tidak semua orang mau menerima informasi rahasia yang dijanjikan. Akibatnya, kecerdasan diperlukan untuk berinteraksi dengan orang-orang ini. Ini adalah Q.S. Al-An'am ayat 83, dimana Allah berfirman:

وَبَلَّغْنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan itulah hujah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya”. (Q.S. Al-An’am: 83).(Supianti 2022)

Manfaat Good Corporate Governance

Perusahaan yang secara konstan menerapkan manajemen yang baik memperoleh manfaat sebagai berikut: (Supianti 2022)

1. Meningkatkan produktivitas bisnis melalui proses yang efektif untuk mendapatkan pemahaman situasi yang jelas, meningkatkan efisiensi operasi bisnis dan meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan.
2. Memungkinkan akses biaya yang lebih murah melalui faktor kepercayaan yang pada ujungnya meningkatkan nilai pemegang saham
3. Membangun kepercayaan investor terhadap ratifikasi perjanjian. 4. Investor pasar saham puas dengan hasil perusahaan karena juga meningkatkan nilai pemegang saham.

Tujuan Good Corporate Governance

Pendapat Abdullah (2010:65) Praktik GCG yang baik sangat penting untuk memupuk kepercayaan publik dan kerja sama internasional serta mempertahankan pertumbuhan sektor keuangan yang aman dan sehat. Sebagai hasilnya, Bank for International Settlements (BIS), sebuah kelompok yang bekerja untuk membuktikan bahwa bank mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, juga telah menerbitkan pedoman GCG untuk industri perbankan internasional. Pedoman tersebut juga telah berhasil diterapkan oleh organisasi internasional lainnya.(Maulidiyah 2013)

Tujuan umum tata kelola perusahaan yang baik adalah:

1. Hati-hati membuat pernyataan yang konsisten dengan kebijakan dan keyakinan semua pejabat organisasi yang terlibat.
2. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan meningkatkan prinsip akuntabilitas, kredibilitas dan akuntabilitas.
3. Memastikan proses transaksi bisnis yang profesional, efisien dan tepat waktu.
4. Memastikan bahwa setiap karyawan Perusahaan menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan dan tanggung jawab yang telah diterapkan.(Supianti 2022)

Kinerja Perbankan

Secara umum, kinerja keuangan adalah hasil dari perusahaan yang menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mengoperasikan bisnis secara efektif dan efisien, terkadang untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian pula hasil komersial bank dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai bank dengan mengelola sumber daya perbankan yang ada dan dimungkinkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan seefisien dan seefektif mungkin. Menilai kinerja bank penting karena perbankan sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketenagakerjaan bank dapat diidentifikasi melalui analisis komparatif nilai tukar. Stabilitas bank diurus oleh Bank Indonesia pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 kepada seluruh bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara teratur tentang Sistem Penilaian Stabilitas Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/ . PBI/2004 of 12. Bank Indonesia Jika diperlukan, Indonesia menetapkan akurasi dan ketepatan waktu hasil analisis bank untuk menilai akurasi dan kelengkapan hasil analisis bank. Jika memungkinkan, Bank Indonesia akan menetapkan keakuratan dan ketepatan waktu hasil hashmark Bank untuk menilai keakuratan dan kelengkapan hasil analisis Bank. Penilaian tingkat solvabilitas bank yang bersangkutan akan diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penawaran penilaian atau pada batas waktu yang ditetapkan oleh otoritas pengawas bank. Penilaian solvabilitas Bank meliputi penilaian permodalan, kualitas aset, manajemen, profitabilitas, likuiditas dan sensitivitas risiko pasar. (Rojali 2021)

METODE PENELITIAN

Metodologi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, yaitu. deskripsi fenomena atau kumpulan data tertentu sebelum maknanya diungkapkan tanpa manipulasi. Pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian primer melibatkan pengumpulan referensi dari berbagai sumber antara lain buku, artikel, pendapat teori dan usulan yang sudah ada sebelumnya, yang selanjutnya dianalisis dengan memakai teknik analisis data. Analisis data, di mana hasil penelitian dimasukkan ke dalam teori atau generalisasi yang mungkin dari data sebelumnya.

Data kedua adalah jumlah data yang dibutuhkan. Artikel ini menggunakan berbagai sumber online seperti esai, majalah dan website tentang tata kelola yang baik dan praktik perbankan halal. Karena pengumpulan data adalah tujuan utama analisis, pengumpulan data adalah cara paling strategis untuk melakukannya. Peneliti melakukan teknik pengumpulan

data dengan mencari berbagai literature untuk menemukan konsep-konsep yang relevan dari kajian non-literary dalam buku, jurnal dan jurnal, serta pendapat ahli yang digunakan untuk mendukung pengaruh good corporate governance terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah. Insiden ini. Semua literatur yang ada dibandingkan dengan sumber-sumber yang sesuai dengan hukum Islam sebelum direvisi secara menyeluruh. Langkah pertama dalam analisis data adalah mengambil, mengidentifikasi, atau memverifikasi aspek terpenting dari data yang tersedia. Setelah melihat data, ada baiknya mendeskripsikan data sebagai teks naratif dalam catatan atau uraian singkat dan diakhiri dengan kesimpulan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan GCG dalam kinerja Bank Syari'ah

Menurut Pasal 2 Angka 1 PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Bertanggung Jawab pada Bank, bank wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab dalam semua kegiatannya, tanpa memandang ukuran atau jenis organisasi.

Penerapan prinsip-prinsip utama tata kelola perusahaan yang baik oleh bank adalah:

1. Pembentukan dan pelaksanaan tugas tingkat komite dan individu pegawai yang menjalankan fungsi Internal Bank Exchange.
2. Auditor internal dan eksternal fungsi kepatuhan.
3. Manajemen risiko, termasuk akuntansi internal.
4. Pemberian dana kepada dan penerimaan uang dalam jumlah besar dari pihak berelasi
5. Rencana Strategis Perbankan
6. Transparansi Hubungan Keuangan dan Non Keuangan Perbankan

PBI No.2/27/PBI/2000 tentang bank umum tidak lagi dicabut oleh PBI No.8/4/PBI/2006 tentang upaya pengelolaan bank umum yang sangat baik.

GCG (Good Corporate Governance) adalah konsep yang didefinisikan secara jelas dalam undang-undang, aturan dan peraturan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri, diterima oleh pemilik bisnis dan organisasi dan lembaga yang memiliki tanggung jawab yang jelas untuk menjaga disiplin, mencegah pelanggaran moral dan memperkenalkan checks and balances. fungsi Contoh indikator dashboard yang diperlukan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang efektif di bank syariah:

- 1) Sistem pengendalian intern

- 2) manajemen risiko
- 3) Kecenderungan melemahkan identifikasi kebutuhan informasi.
- 4) Sistem Akreditasi
- 5) Mekanisme Jaminan Kepatuhan Syariah
- 6) Pemeriksaan luar

Poin utama dari paragraf ini adalah semua bank, baik konvensional maupun syariah, akan mendapatkan keuntungan. Satu-satunya hal yang mendukungnya adalah gagasan bahwa harus ada alat untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai dan hukum Syariah di bank. Sistem perbankan tradisional tidak mencakup ini.

Bagi bank untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Syariah, hanya dua hal utama yang perlu diperhatikan. Pertimbangan ini tercantum di bawah ini.

1. Alat bukti hukum dan mekanisme kerja (izin) dari fatwa yang berwenang, dalam hal ini DSN MUI, wajib menunjukkan bahwa penjualan barang atau rekening bank sesuai dengan prinsip Halal.
2. Sistem check and balance yang mengatur transaksi perbankan menurut fatwa resmi perbankan harus berjalan. Masalah yang tersisa dalam hal ini adalah sangat sedikit yang memiliki pemahaman yang kuat tentang logika terbatas dan simbolik serta pemahaman yang kuat tentang terminologi perbankan.(Maulidiyah 2013)

Peran Good Corporate Governance dalam Perbankan

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan prinsip-prinsip GCG secara spesifik pada tahun 1998; Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Prinsip sebagai acuan dilarang di banyak negara dengan karakteristik hukum, budaya dan lingkungan tertentu.

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang diterima secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi hak-hak pemilik perusahaan
- b. mengevaluasi perlakuan terhadap seluruh instrumen perusahaan
- c. peran pemangku kepentingan dalam perusahaan
- d. keterbukaan dan transparansi,

Tata kelola yang baik harus dapat memberikan jawaban yang tepat waktu dan akurat atas semua pertanyaan yang terkait dengan operasi organisasi.(Memet Juliansyah 2018)

Good Corporate Governance (GCG) pada Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, tata kerja yang baik harus mengikuti prinsip-prinsip berikut, Transparansi, akuntabilitas, akuntabilitas, independensi dan keadilan. Menurut lembaga keuangan Islam, tata kelola yang baik harus mencakup:

1. Sekelompok organisasi di mana manajer lembaga keuangan Islam hadir bila memungkinkan dan di mana kebutuhan pemangku kepentingan terpenuhi.
2. Dukungan berbasis niat, cocok untuk organisasi manajemen seperti direktur, dewan Syariah dan manajemen untuk mencapai tujuan sesuai dengan tujuan pemangku kepentingan dan memberikan kemampuan pemantauan yang efektif, mendorong lembaga keuangan syariah untuk menggunakan dana secara lebih efektif.
3. Patuhi hukum dan prinsip Syariah.(Supianti 2022)

Tahap-Tahap Penerapan Good Corporate Governance

Dalam penetapan GCG yang baik di suatu perusahaan atau organisasi, sangat penting bagi organisasi untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap situasi bisnis, keadaan dan waktu agar GCG dapat berjalan dengan lancar dan didukung oleh semua departemen di sekitarnya. Secara umum, perusahaan yang mempraktikkan manajemen yang baik berhasil menggunakan ungkapan berikut:

1. Tahap persiapan

Ada tiga Langkah utama dalam tahapan ini:

- a. Peningkatan kesadaran merupakan langkah awal untuk mengembangkan pengetahuan tentang pentingnya tata kelola yang baik dan kerja sama tim selama implementasinya. Pembayaran ini dapat dilakukan dengan meminta mempekerjakan pekerja lepas di luar perusahaan. Anda dapat mengatur seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok sebagai bagian dari proyek Anda.
- b. Penilaian tata kerja perusahaan yang baik merupakan peluang untuk mencapai atau lebih efektif menilai kondisi praktik GCG perusahaan saat ini. Tujuan dari fase ini adalah untuk memastikan titik awal tata kelola perusahaan yang baik, dengan mempertimbangkan infrastruktur dan struktur organisasi perusahaan, dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah tepat yang harus diterapkan secara efektif.
- c. Membangun sistem tata kinerja perusahaan yang kuat adalah langkah selanjutnya setelah mengevaluasi tata kelola yang baik. Pembuatan manual atau pedoman penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat disusun berdasarkan hasil evaluasi tingkat maturitas perusahaan dan identifikasi prioritas pelaksanaannya.

Pembersihan manual dapat dilakukan dengan bantuan ahli eksternal independen. Manual ini dapat dibandingkan dengan manual struktur organisasi dan manual personel, yang terakhir memberikan contoh standar barbar yang lebih spesifik seperti:

- a) Sistem manajemen bisnis yang baik
- b) pedoman tata kerja yang baik untuk masing-masing perusahaan
- c) Instruksi pribadi
- d) Statuta Komite Kontrol
- e) pengungkapan dan transparansi
- f) manajemen risiko dan penguatannya
- g) Implementasi peta jalan

2. Tahap Implementasi

Langkah selanjutnya adalah mulai menerapkan contoh tata kerja perusahaan yang baik di seluruh perusahaan setelah contoh tersebut diterapkan. Ada tiga klausa utama dalam paragraf ini:

- a. Sosialisasi dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada setiap perusahaan tentang berbagai bidang penerapan tata kerja yang baik, terutama pedoman tata kelola yang baik. Kegiatan sosialisasi harus dilakukan dengan anggota tim yang dipilih secara khusus yang selalu hadir di dekat meja manajer, atau dengan manajer yang diakui sebagai juara GCG perusahaan.
- b. Implementasi atau proyek yang berkelanjutan sesuai dengan konsep tata kerja yang baik dan sesuai dengan peta jalan yang telah disetujui. Implementasi juga mencakup rencana untuk mengelola perubahan yang sedang berlangsung untuk memulai perubahan yang diprakarsai oleh pengenalan tata kerja yang baik.
- c. Internalisasi, yaitu taktik implementasi jangka panjang Internalisasi sangat disarankan untuk mengintegrasikan manajemen yang baik dalam semua bisnis, kebijakan dan prosedur. Dalam pernyataan ini, good governance bukan sekedar slogan atau seperangkat pedoman yang tidak bermakna; Sebaliknya, itu menembus semua aspek operasi perusahaan.

3. Tahap Evaluasi

Tugas ini merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan secara cermat setiap hari guna mengevaluasi efektivitas pelaksanaan good governance. Tugas lembaga

independen tersebut adalah melakukan audit dan mengevaluasi sistem manajemen yang baik yang sudah ada. Sehubungan dengan penerapan tata kelola yang baik, evaluasi dapat membantu pelaku ekonomi untuk secara proaktif mengidentifikasi kerangka kondisi dan situasi untuk melakukan perbaikan yang diperlukan berdasarkan saran yang diberikan.

Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada Perbankan

Sebagai contoh, Pedoman GCG untuk industri perbankan Indonesia memberikan informasi sebagai berikut:

- a. Sebagai bagian dari penerapan GCG di setiap bank, perlu ditetapkan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan.
- b. Struktur administrasi dapat diuraikan secara rinci dan terdiri dari beberapa komponen.
 - 1) Sistem pengelolaan perusahaan yang memuat visi dan misi Bank, juga mencakup GCG dan perangkat yang diperlukan untuk mengerjakan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran.
 - 2) Kode etik yang mewajibkan dan memperbolehkan perilaku jujur mucikari dan pegawai bank.
 - 3) Pembuatan model dan pengumuman tujuan diperlukan sebagai bagian dari tanggung jawab bank kepada pemangku kepentingan. Keterbukaan informasi dapat ditemukan dalam buku (laporan tahunan), website, review kegiatan GCG dan sumber lainnya.
 - 4) Promosi budaya perusahaan untuk memajukan tujuan organisasi dan menerapkan struktur manajemen.(Nasution 2019)

Perbedaan GCG Konvensional dan Syariah

Bank Kovenvensional

1. Bagi bank tradisional, kunci pengelolaan simpanan adalah menjaga selisih yang tipis di antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman, sedangkan kunci pengelolaan distribusi adalah menjaga selisih ideal antara kedua suku bunga tersebut. Selain organisasi tersebut, debitur (debitur) bertanggung jawab untuk memperhatikan ambang batas bunga yang tinggi. Akibatnya, terjadi ketidakharmonisan yang kuat dalam konfrontasi antara ketiga pihak terkait kepentingan bersama. Bank tradisional hanya bertindak sebagai satu negara dalam situasi ini.

2. Karena setiap organisasi memiliki gagasan yang saling bertentangan, tidak memiliki hubungan emosional yang kuat antara investor saham, bankir, dan pelanggan.
3. Sistem bunga
 - a. Mendukung kepentingan yang dihasilkan sehubungan dengan iklan dengan uang untuk kepentingan bank.
 - b. Banyaknya keputusan tergantung dari banyaknya uang yang disetorkan.
 - c. Tingkat bunga yang melonjak tidak meningkat meskipun tingkat keuntungannya besar jika ekonomi berjalan dengan baik. yaitu Semua agama, termasuk Islam, telah menegaskan keabsahan hubungan etis ini.
 - d. Pembayaran satu kali akan berlanjut seperti sebelumnya tanpa mengganggu proyek yang diprakarsai oleh perwakilan pelanggan Untung atau Rugi.

Bank Syariah

1. Menurut Islam, hati manusia adalah ciptaan Allah SWT, sehingga penggunaannya harus mengikuti dengan ajaran Islam.
2. Bank Islam menyarankan klien untuk membayar redistribusi aset klien sesuai dengan hukum Islam.
3. Bank syariah menetapkan moralitas/sikap baik konsumen maupun pekerja pada posisi yang sangat penting dan memandang akhlakul karimah sebagai sikap dasar hubungan perbankan nasabah.
4. Adanya hubungan emosional yang kuat antara pemegang saham, bank dan nasabah berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan dan perdamaian dengan mengorbankan perbankan syariah.
5. Bagi hasil
 - a. Faktor risiko utama reksa dana adalah berhati-hati selama fase masuk karena ada kemungkinan kehilangan uang.
 - b. Banyaknya nisbah bagi hasil tergantung dari besarnya pendapatan yang dikeluarkan.
 - c. Angka bagi hasil semakin tinggi sesuai dengan pencapaian pendapatan.
 - d. Tidak ada yang mengklaim bahwa hasilnya akan positif. Setiap hasil menguntungkan untuk proyek yang dimulai. Jika proyek tidak menghasilkan keuntungan, kedua organisasi sponsor bergabung untuk membuang sisa dana.(Nasution 2019)

KESIMPULAN

Tata kelola perusahaan (GCG) yang baik didefinisikan sebagai proses dan struktur organisasi spesifik yang digunakan entitas bisnis (seperti pemegang saham/pemegang saham, anggota komite/dewan dan direktur perusahaan) untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan akuntabilitas organisasi untuk melindungi hak pemangku kepentingan lainnya. seperti karyawan atau karyawan dan personel pelanggan) dan mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan harga referensi yang berlaku.

Tata kelola yang baik adalah konsep yang didefinisikan dengan jelas sebagai undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh regulator yang tidak memihak, asosiasi perdagangan dan pengusaha dan organisasi kelembagaan dengan fokus yang jelas untuk mempromosikan disiplin, mengurangi moral hazard dan menerapkan checks and balances. .

Pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melibatkan pengumpulan referensi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, pendapat teori dan gagasan yang sudah ada sebelumnya, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data.

Sejumlah komponen kunci diperlukan untuk mendorong tata kelola yang kuat di bank syariah, termasuk: Sistem Pengembangan Internal, Manajemen Risiko, Keamanan Informasi, Identifikasi Sistem, Mekanisme Kepatuhan Syariah, Audit Eksternal. Poin utama dari paragraf ini adalah semua bank, baik konvensional maupun syariah, akan mendapatkan keuntungan.

Perlindungan hak-hak pemilik perusahaan, perlakuan yang sama terhadap semua karyawan perusahaan, peran kelompok kepentingan yang terkait dengan perusahaan adalah prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang diakui secara luas. Kejujuran dan Transparansi Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik membutuhkan kemampuan untuk menanggapi secara tepat waktu dan akurat untuk semua hal yang terkait dengan perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) Lembaga Keuangan Syariah Konsisten dengan prinsip-prinsip di atas, tata kelola perusahaan yang baik harus berpegang pada prinsip-prinsip berikut, antara lain: Transparansi, akuntabilitas, independensi dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indriyani, Indriyani, and Rinda Asyuti. 2019. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah." *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 1 (2): 111–20. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v1i2.117>.
- Maulidiyah, Innake Nabilatul. 2013. "Implementasi Good Corporate Governance." *Jurnal*

Ekonomi Dan Kewirausahaan 10 (2): 126–38.

Memet Juliansyah. 2018. “ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH (Study Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung) SKRIPSI.” *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*. 1 (69): 5–24.

Nasution, J. 2019. “Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Muamalat (Studi Kasus Pada Bank Muamalat KC. Medan Balai Kota).”
<http://repository.uinsu.ac.id/10149/>.

Rojali, Ahmad rojali. 2021. “Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Di Kota Medan.” *Juripol* 4 (1): 276–84.
<https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11038>.

Supianti, Nining. 2022. “ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN PADA KSPPS KARYA MANDIRI JEROWARU LOMBOK TIMUR.” *γ787*, no. 8.5.2017: 2003–5.